

**ANALISA**

Tahun V No. 9

SEPTEMBER 1976

**NEGARA NON-BLOK  
DAN  
MASALAH HABITAT**





Tahun V, No. 9

SEPTEMBER 1976

NEGARA NON-BLOK  
DAN  
MASALAH HABITAT

seri ANALISA



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES  
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Phone 56532/35



## PENGANTAR PENERBIT

Salah satu manfaat dari perkembangan science dan teknologi ialah bahwa semakin terungkapnya dimensi baru dari masalah yang dihadapi hari ini maupun hari esok. Demikianlah semakin diungkap suatu kenyataan sederhana bahwa kapal angkasa (bumi) yang kita tumpangi ini, hanya satu dan terbatas kemampuannya. Sedang lapisan hidup, biosfer, merupakan selaput teramat tipis melilit kulit bumi, dengan berat seperibu juta daripada bumi yang menjadi tumpuannya; salah satu konstituen daripada biosfer yang hidup parasitis dan karenanya sangat menentukan kelangsungan hidup biosfer, ialah sang manusia.

Kelompok-kelompok manusia pada lapisan hidup yang melilit di kulit bumi ini, tak ubahnya seperti borok, yang merobek lapisan hidup. Mungkin dapat dibandingkan seperti borok pada pada kulit seseorang. Sebentar lagi, diujung abad dua puluh, penduduk manusia akan dua kali lipat, berarti proses pemborokan lingkungan hidup akan meningkat lagi takarannya. Dan kalau tingkah laku manusia tidak dapat dikendalikan lagi, maka proses pemborokan lingkungan semakin menghancurkan lapisan hidup, berarti habislah riwayat kehidupan di planet kita; atau dengan kata lain musnahnya sejarah homo sapiens, yang telah dirintisnya kurang lebih 500.000 tahun yang lalu.

Ini semua mengingatkan kita, bahwa masalah manusia dan kelangsungan hidup biosfer akan menjadi tambah urgen pada waktu yang akan datang. Salah satu seginya yang menonjol ialah, bagaimana melangsungkan hidup manusia sesuai dengan martabatnya, antara lain melalui kegiatan permukiman di satu pihak, serta usaha melestarikan kelangsungan hidup biosfer di pihak lain.

Uniknya, manusia yang memboroki kulit bumi ini, tidak tersebar merata lokasinya, baik menurut jumlah maupun tingkat kemajuan; yang memborok di belahan utara relatif sedikit, dan maju dibandingkan dengan yang berlokasi di belahan Selatan, dan karenanya yang terakhir ini sering dijuluki negara berkembang. Sedang pengaturan hubungan hidup bersama manusia di planet ini, ternyata lebih menguntungkan yang

maju dan merugikan yang belum maju. Ini dirasa tidak adil, sebab akibatnya, yang maju tambah maju, sedang yang terbelakang tambah melarat.

Dalam ANALISA kali ini, N. ARSYAD mencoba memaparkan kondisi dan posisi NEGARA-NEGARA NON-BLOK (yang dapat dianggap sebagai cermin manusia belahan Selatan) dan MASALAH EKONOMI DUNIA, dalam hubungannya dengan mereka yang berlokasi di Utara; sedang ONNY S. PRIJONO mengemukakan masalah HABITAT DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN MANUSIA. Kedua thema ini, seperti juga telah disampaikan di atas, akan tetap semakin hangat dan urgen pada waktu-waktu yang akan datang, karenanya pantas merangsang perhatian kita semua untuk menelitinya lebih lanjut.

September 1976

C S IIS

# DAFTAR ISI

<i>Pengantar Penerbit</i>	iii
 <i>NEGARA-NEGARA NON-BLOK DAN MASALAH EKONOMI DUNIA</i> <i>N. ARSYAD</i>	 1
 <i>HABITAT DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN MANUSIA</i> <i>Onny S. PRIJONO</i>	 17
 <i>Lampiran</i>  <i>Economic Declaration (Document of the Fifth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, Colombo, August 16-19, 1976</i>	   33



Pengantar Penulis

iii

NEGARA-NEGARA NON-BLOK DAN MASALAH EKONOMI DUNIA

N. ARSYAD

1

HABITAT DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN MANUSIA

Onny S. PRIONO

17

Lampiran

Economic Declaration (Document of the Fifth  
Conference of Heads of State or Government  
of Non-Aligned Countries, Colombo, August  
16-19, 1976

33



# NEGARA-NEGARA NON-BLOK DAN MASALAH EKONOMI DUNIA

N. ARSJAD

## PENDAHULUAN

Negara-negara non-blok yang biasa juga disebut negara-negara "tidak memihak" (non-aligned countries), baru saja mengadakan konferensi puncak ke-5 di Kolombo bulan Agustus tahun ini (16-19 Agustus 1976).

Sejak konferensinya yang pertama di Belgrado, Yugoslavia tahun 1961 hingga mereka (negara-negara non-blok) bertemu di Kolombo, Sri Lanka waktu telah berjalan 15 tahun lamanya. Banyak masalah dan tantangan telah dialami dan dihadapi oleh negara-negara non-blok. Sementara itu negara-negara yang menjadi anggota gerakan non-alignment ini kian bertambah besar. Pada pertemuan puncak di Belgrado, kelompok non-alignment ini beranggotakan 25 negara, dan bertambah menjadi 47 negara pada konferensi kedua di Kairo (1964), bertambah lagi menjadi 53 negara dalam konferensi ke-3 di Lusaka (1970), menjadi 75 negara anggota pada pertemuan ke-4 di Aljazair (1973) dan sekarang pada pertemuan Kolombo (1976) negara-negara non-aligned bertambah menjadi 86 negara<sup>1</sup>. Makin bertambahnya negara-negara anggota gerakan ini, yang berasal dari pelbagai daratan dengan sistem sosial, ekonomi dan politik yang berbeda pula, menunjukkan bahwa eksistensi non-alignment masih diperlukan dan dihargai sebagai alat perjuangan.

---

<sup>1</sup>Documents of the Conference, "Political Declaration", Review of International Affairs, Volume XXVII, no. 634, Belgrade, 5 September 1976, halaman 19

Akan tetapi, walaupun demikian, sekarang timbul pertanyaan yang mungkin naif sifatnya, namun menggoda: Apakah peranan non-alignment masa kini masih perlu? Apakah non-alignment masih dapat memainkan peranannya yang besar seperti di tahun-tahun 1960-an atau sebelumnya? Efektifkah peranannya sekarang ini?

Hubungan internasional akhir-akhir ini banyak mengalami perubahan. Gejala-gejala baru bermunculan dan merubah bentuk dan pola hubungan internasional itu sendiri. Perang-perang dingin yang antara lain ditimbulkan karena adanya pertentangan ideologi antara blok Barat dan blok Timur relatif mereda. Detente politik, walaupun masih terbatas, sedang ditegakkan. Di forum internasional sekarang jarang sekali ditonjolkan promosi-promosi ideologi politik yang sering menimbulkan ketegangan-ketegangan.

Lahirnya gerakan non-alignment didorong oleh keadaan setelah Perang Dunia II. Negara-negara non-blok ini secara aktif turut memberikan sumbangan mereka di dalam meredakan ketegangan-ketegangan dunia, menggalang terselenggaranya hidup berdampingan secara damai, serta keamanan dunia. Non-alignment juga berjuang untuk menghilangkan penjajahan serta imperialisisme dalam segala bentuknya, anti politik apartheid, rasialisme, zionisme dan lain-lain bentuk dominasi suatu negara terhadap negara lainnya.

Di bidang ekonomi, sejak semula (sekurang-kurangnya sejak konferensi Lusaka), negara-negara non-alignment juga menghadapi banyak tantangan dan masalah. Lebih-lebih dalam dasawarsa tahun-tahun 1970-an, nampaknya masalah-masalah politik internasional, khususnya setelah berakhirnya Perang Vietnam, telah tergeser ke belakang oleh masalah-masalah ekonomi internasional yang situasinya semakin panas, karena di samping kemajuan-kemajuan, juga mengalami krisis-krisis, termasuk krisis "hubungan" antara "Utara" dan "Selatan". Bahkan tidak jarang terjadi konfrontasi dan konflik. Lahirnya gagasan Orde Ekonomi Internasional Baru adalah sebagai cermin adanya ketidak-adilan dalam pembagian kekayaan di dunia ini.



## PERKEMBANGAN EKONOMI TAHUN-TAHUN 1970-AN

Perkembangan ekonomi sekarang ini memunculkan banyak masalah yang tidak kalah pentingnya dengan masalah-masalah di bidang politik dan hubungan internasional pada umumnya. Sebenarnya politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Politik internasional negara-negara sedikit banyak diwarnai oleh latar belakang ekonomi. Sebaliknya tindakan-tindakan ekonomi suatu negara di forum internasional diputuskan dengan pertimbangan yang serba politis sifatnya.

Hubungan ekonomi internasional memerlukan suatu sistem yang menciptakan aturan permainan baik di bidang perdagangan, investasi, pembayaran dan moneter internasional pada umumnya. Apabila diperlukan penyempurnaan, perombakan atau pembaharuan hubungan (dalam suatu sistem), maka hasilnya bisa memuaskan atau tidak memuaskan. Usul-usul pembaharuan yang tidak bersifat prinsipiil biasanya lekas membawa hasil, tetapi apabila sangat prinsipiil sekali sifatnya, jarang membawa hasil atau baru dapat dirasakan hasilnya di dalam jangka waktu yang sangat lama. Ini semua karena adanya perbedaan sikap dan kepentingan dari masing-masing negara. Dengan begitu "kemauan politik" merupakan faktor yang memutuskan dan menentukan.

Karena situasi perkembangannya di tahun-tahun 1970-an, banyak aspek-aspek dari sistem hubungan ekonomi internasional memerlukan pembaharuan. Aspek-aspek yang paling sulit memperoleh kata sepakat antara lain adalah aspek-aspek di sekitar (i) sistem moneter internasional yang menyangkut pula soal pelimpahan sumber-sumber keuangan riil untuk pembiayaan pembangunan negara-negara berkembang, (ii) sistem perdagangan internasional, khususnya yang menyangkut soal-soal harga produksi barang-barang primer dan bahan mentah, (iii) pangan dan pertanian pada umumnya, (iv) kerjasama di bidang pengembangan industri, (v) ilmu pengetahuan dan teknologi dan (vi) "re-structuring" sektor-sektor ekonomi dan sosial dari sistem organisasi PBB.

Para ahli pengamat perkembangan ekonomi dunia menamakan dasawarsa tahun-tahun 1970-an ini sebagai dasawarsa perubahan. Bagi negara-negara industri maju, dasawarsa 1970-an merupakan dasawarsa peralihan menuju ke

suatu masyarakat "post industry". Pada tahun-tahun 1970-an perkembangan ekonomi dunia juga ditandai oleh pelbagai macam krisis. Bahkan ada yang berpendapat bahwa adanya macam-macam krisis ini justru sebagai pertanda perlu dimulainya pembaharuan dalam setiap aspek hubungan dan kerjasama internasional.

Beberapa masalah besar yang dihadapi dunia dewasa ini menunjukkan perlunya diwujudkan prinsip keadilan sosial dalam sistem politik dan ekonomi dunia.

Masalah penduduk adalah salah satu masalah besar yang dihadapi dunia dewasa ini, bahkan sudah sejak lama. Untuk waktu-waktu mendatang yang lama, distribusi penduduk dunia masih pincang. Masalahnya bukan hanya dilihat dari pertambahan jumlah penduduk dibanding dengan sumber-sumber ekonomi yang terbatas (terutama pangan), tetapi juga berhubungan dengan masalah penyediaan lapangan kerja. Bahkan di beberapa negara pertambahan jumlah penduduk sudah jauh melampaui perkembangan produksi nasional mereka. Dalam tahun 1980 diperkirakan bahwa penduduk di negara-negara industri maju dan Uni Soviet (kurang lebih 25% dari seluruh penduduk dunia) akan menikmati 80% dari GNP dunia. Ini semua ada kaitannya dengan masalah pemerataan dan keadilan.

Krisis pangan yang terutama amat terasa di tahun 1972, juga merupakan masalah besar yang dihadapi dunia, padahal sebelumnya orang sudah berani menyatakan adanya "green revolution" di banyak daerah pertanian di dunia ini. Sekarang, ternyata bahaya kelaparan sedang mengancam dunia. Lebih-lebih keadaan produksi dan distribusi pupuk sedunia juga menjadi masalah.

Situasi dan perkembangan ekonomi dunia dasawarsa tahun-tahun 1970-an masih tetap menunjukkan adanya jurang perbedaan di dalam pertumbuhan ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dalam hubungannya dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan "development aid" mengalami kemunduran (aid crisis) baik dilihat dari kuantitasnya maupun dilihat dari kualitasnya yaitu cara penggunaannya yang lebih efektif.



Masalah lain yang cukup besar pengaruhnya dalam perkembangan ekonomi dunia di masa-masa mendatang ialah masalah pergeseran posisi negara-negara yang ekonominya kuat baik dalam bidang perdagangan maupun dalam hal arus perpindahan kapital di dunia ini. Sejak tahun 1958 sebenarnya posisi USA dan United Kingdom (Inggris) sudah mulai tergeser dari percaturan dunia. Peranan kedua negara besar ini yang tadinya bertindak sebagai "world's bankers" sudah mulai mundur sejak tahun 1958. Sejak itu negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa mulai memegang peranan di muka dalam percaturan ekonomi internasional. Jepang juga tidak kalah peranannya dalam gelanggang ekonomi internasional.

Kemajuan yang luar biasa dalam perdagangan internasional pada akhirnya telah membawa sejumlah krisis-krisis ekonomi dan konjungtur ekonomi dalam negeri dari negara-negara besar, seperti krisis moneter internasional yang diiringi dengan penyakit-penyakit ekonomi dalam negeri seperti resesi-resesi, pengangguran-pengangguran dan pemogokan-pemogokan yang cukup mencemaskan, bahkan perkembangan produksi menjurus ke arah stagnasi. Satu hal unik yang perlu dicatat dalam suasana krisis ini yaitu adanya penyakit inflasi yang melanda di hampir semua negara di dunia ini, baik maju maupun yang masih berkembang, padahal roda kegiatan produksi dunia sedang mengalami "lesu darah".

Adanya segala macam krisis konjungtur ekonomi dunia tersebut, diperhebat lagi dengan pecahnya krisis energi. Hal ini membuktikan bahwa dunia kekurangan sumber-sumber energi. Adalah suatu kenyataan bahwa sumber-sumber energi masa kini berada di tangan beberapa negara berkembang yang telah membentuk satu kekuatan baru di dunia ini dan yang kekuatannya mempunyai ruang lingkup yang bersifat global.

Satu masalah besar lagi yang dihadapi dunia masa kini adalah "business" dari perusahaan-perusahaan raksasa multinasional yang berkekuatan dunia pula. Di satu pihak perusahaan-perusahaan raksasa ini dipandang telah membawa kemajuan dan modernisasi kehidupan ekonomi dunia, tetapi di lain pihak dipandang sebagai faktor yang telah membawa ketegangan-ketegangan baru di dunia ini. Dalam banyak hal perusahaan-perusahaan tersebut telah mengurangi kedaulatan banyak negara-negara berkembang atas sumber-sumber daya dan kekayaan mereka.

Di luar bidang ekonomi terdapat pula beberapa masalah besar yang bisa merupakan benih, timbulnya ketegangan-ketegangan baru di dunia.

Sekarang ini terdapat suatu perkembangan dalam segi kehidupan manusia, baik terlihat di negara-negara maju, maupun terlihat di negara-negara berkembang, yaitu suatu gejala apa yang disebut "the rising expectations" dalam bidang "quality of life". Manusia masa kini lebih menyadari lagi akan harga dirinya di samping ingin memenuhi kesejahteraan materiilnya. Tiap manusia ingin mendapat perlakuan yang manusiawi. Di negara-negara yang sedang membangun terdapat alienasi karena proses modernisasi, dan di negara-negara maju terdapat alienasi karena terdapat proses kekayaan materiil melimpah (affluensi). Apabila karena gejala ini tidak diadakan suatu pendekatan baru dalam pembangunan yang berorientasi kepada pembangunan manusia masa kini, maka bisa berakibat timbulnya suatu ketegangan-ketegangan baru.

Masalah besar lainnya adalah masalah "internasional warfare" yang merupakan masalah tersendiri pula. Berkat adanya perkembangan teknologi yang amat pesat dewasa ini, maka di bidang peralatan dan sistem persenjataan perang telah bersifat intercontinental yakni telah melampaui batas-batas negara. Akibatnya bahwa penggunaan alat-alat perang tersebut juga terbatas sifatnya, sebab bukan saja bisa menghancurkan lawan, tetapi bisa juga menghancurkan diri sendiri. Oleh karena itu bentuk perang-perang kecil (limited war) dan subversi-subversi masih terus turut mewarnai ketegangan-ketegangan di dunia ini.

Masalah-masalah teritorial yang sering juga ada kaitannya dengan masalah-masalah besar lainnya, turut menambah ketegangan-ketegangan dunia. Contoh-contohnya dapat kita lihat pada masalah kawasan aliran sungai Mekong, emansipasi hitam di selatan benua Afrika, masalah Timur Tengah dan lain sebagainya.

Ada satu lagi masalah besar yang bisa membawa akibat-akibat negatif pada perkembangan kehidupan dunia yaitu masalah lingkungan (ekologi). Karena adanya perkembangan teknologi di bidang transport dan komunikasi pada umumnya, dunia ini terasa semakin sempit. Integrasi sosial dan ekonomi antar bangsa semakin erat. Dengan demikian kontak manusia antar bangsa



semakin erat dan sering. Hal ini bisa menimbulkan konflik dan ketegangan yang tidak bisa dielakkan. Bahaya pencemaran alam (polusi) juga makin amat terasa. Adanya kontak yang makin mudah dan kerap itu bisa mempertajam masalah kaya dan miskin.

## MASALAH KAYA - MISKIN

Barangkali satu isyu yang paling besar dewasa ini dalam pergaulan ekonomi internasional, adalah masalah negara-negara kaya dan negara-neg miskin. Negara-negara kaya biasa disebut negara-negara "Utara" dan negara-negara miskin adalah negara-negara "Selatan".

Ketenteraman dan kedamaian dunia dengan demikian bisa saja dirusak oleh ketegangan-ketegangan ekonomi yang ditimbulkan dari masalah Utara-Selatan yang semakin menonjol dalam dasawarsa tahun-tahun 1970-an. Peristiwa yang berkaitan dengan krisis energi (sebagai cermin adanya hubungan antara masalah politik dan ekonomi) adalah satu contoh jelas adanya semacam sikap saling berkonfrontasi antara Utara dan Selatan.

Diakui bahwa setelah Perang Dunia II, usaha meningkatkan kemakmuran dunia telah membawa hasil yang luar biasa. Namun, di samping itu jurang perbedaan kemajuan antara Utara dan Selatan semakin besar. Distribusi kekayaan di dunia ini sekarang amat pincang sekali. Penguasaan dan pengawasan atas sumber-sumber alam suatu negara sering terlepas dari kekuasaan pemerintah negara yang bersangkutan, karena dominasi dan tekanan-tekanan dari pihak luar amat kuatnya. Kemajuan yang amat pesat di dalam usaha meningkatkan kemakmuran dunia tidak diikuti oleh adanya keadilan dan pemerataan. Dengan demikian perbedaan yang menyolok antara Utara dan Selatan bukan saja akan merusak kestabilan ekonomi internasional, tetapi dapat mengganggu kestabilan politik internasional.

Dalam hubungannya dengan masalah kaya-miskin ini, satu hal yang sering menjadi sorotan adalah bahwa hingga kini keputusan-keputusan penting yang dilakukan dalam badan-badan internasional tidak menguntungkan negara-negara berkembang. Akibatnya pola dan organisasi pasar internasional sering tidak memberi manfaat buat pembangunan ekonomi negara-negara



berkembang. Struktur ekonomi dunia yang menyangkut pola-pola investasi, produksi, pertukaran dan distribusi, serta lokasi kekuatan untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomis (baik oleh Pemerintah maupun swasta) yang mempengaruhi pola-pola ekonomi tersebut, sering merugikan negara-negara Selatan.

Pada waktu masalah-masalah di sekitar konsep Orde Ekonomi Internasional Baru (OEIB) diperdebatkan pada sidang Khusus ke-7 MU PBB mengenai pembangunan dan kerjasama ekonomi internasional (1-16 September 1975), terdapat 7 (tujuh) masalah pokok yang hangat dibicarakan dan yang mencerminkan situasi perkembangan ekonomi dasawarsa tahun-tahun 1970-an. Masalah-masalah pokok tersebut adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Pemikiran tentang perlu diperbaikinya kondisi pertukaran (terms of trade) dan daya beli terhadap hasil ekspor negara-negara berkembang;
2. "Indexation" yaitu pemikiran untuk mengkaitkan harga barang-barang ekspor negara-negara berkembang dengan harga barang-barang yang banyak dibutuhkan dan diimpor negara-negara berkembang bagi pembangunan mereka, atau dikaitkan dengan indeks inflasi;
3. Pemikiran tentang stabilisasi harga bagi komoditi-komoditi secara menyeluruh dan terpadu (integrated);
4. Target dari bantuan resmi;
5. Kaitan SDR sebagai bantuan pembangunan negara-negara berkembang;
6. Masalah likuiditas internasional;
7. "Code of conduct" di bidang pelimpahan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## DIMENSI BARU YANG DIHADAPI NEGARA-NEGARA NON-BLOK

Dilihat dari sudut sejarah munculnya gerakan non-alignment, sikap dasar negara-negara non-aligned ini adalah tidak suka melihat adanya negara-negara yang terpecah dua, bergabung dalam blok-blok: Timur dan

<sup>1</sup>Laporan Delegasi RI ke Sidang Khusus ke-VII Majelis Umum PBB mengenai Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi Internasional di New York, tanggal 1-16 September 1975, halaman 3-4

Barat, dan sangat prihatin melihat adanya perang-perang dingin yang ditimbulkan oleh adanya blok-blok tersebut. Hal-hal itulah yang bisa mengancam perdamaian, kemerdekaan dan keamanan di dunia ini.

Dalam dasawarsa tahun-tahun 1970-an nampak sekali menurunnya pertentangan antara blok Barat dan blok Timur. Sistem hubungan internasional yang ditentukan oleh keseimbangan kekuatan militer dua negara "super power" (bipolar system) sudah tidak terasa lagi. Lengkingan suara protes yang datangnya dari gerakan non-alignment terhadap kolonialisme, neo-kolonialisme, imperialisme dan segala bentuk penindasan dan dominasi negara-negara kuat terhadap negara-negara lemah, kurang terdengar lagi. Bahaya yang menyeramkan dari adanya kemungkinan perang nuklir telah berkurang.

Dasawarsa 1970-an membawa dimensi baru yang merubah sikap dan pandangan gerakan non-alignment dalam meninjau situasi dan perkembangan dunia dewasa ini. Deklarasi ekonomi yang dihasilkan konferensi Kolombo bulan Agustus yang lalu itu menyatakan bahwa isu-isu ekonomi sekarang ini merupakan isu-isu yang paling gawat. Lebih jauh konferensi mengkonstatir bahwa faktor-faktor yang secara langsung mengancam perdamaian internasional dewasa ini adalah perusahaan-perusahaan imperialis yang agresif sifatnya, perang-perang kolonial yang masih berlangsung dewasa ini, didudukinya (occupation) beberapa wilayah (territories) oleh kekuatan-kekuatan asing, dominasi asing dalam segala bentuknya, penipuan dan penghisapan suatu negara terhadap negara yang lain, dan adanya kenyataan bahwa dunia telah terpecah ke dalam kelompok negara kaya dan kelompok negara miskin. Dalam hubungannya dengan hal itu semua, konferensi berkesimpulan bahwa detente politik tak mungkin menjadi kenyataan apabila "international order" dewasa ini masih didasarkan atas ketidak-adilan.

Sebenarnya, sejak konferensinya yang pertama di Belgrado, Yugoslavia (1961), gerakan non-alignment telah menyadari betapa pentingnya masalah ekonomi untuk ditinjau di samping masalah-masalah politik. Bahkan disadari bahwa masalah ekonomi adalah bagian yang integral dengan masalah-masalah lainnya di samping politik. Konferensi Belgrado tersebut telah mengundang negara-negara non-blok untuk mengadakan konferensi yang terpisah, khusus meneliti masalah-masalah ekonomi internasional serta



pembangunan ekonomi. Segera setelah itu diadakan konferensi ekonomi di Kairo tahun 1962. Bahkan konferensi Kairo ini telah turut mempengaruhi lahirnya UNCTAD yang telah mengadakan pertemuannya yang pertama pada tahun 1964 di Jenewa.

Konferensi Kairo tahun 1962 itu telah menghasilkan satu kesimpulan bahwa isu-isu di bidang ekonomi merupakan faktor yang vital dari keseluruhan situasi dan hubungan internasional. Konferensi Kairo ini (9-18 Juli 1962) disponsori oleh negara-negara Sri Lanka (Ceylon), Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Lybia, Mali, Sudan, Republik Arab Persatuan dan Yugoslavia. Konferensi Kairo ini sendiri diikuti oleh 36 negara-negara non-blok (termasuk "observer"), baik datangnya dari benua Asia, Afrika maupun dari Amerika Latin dan Eropa. Di samping itu lembaga-lembaga PBB seperti FAO, IMF, dan World Bank serta lembaga-lembaga lainnya seperti Liga Negara-negara Arab dan Organisasi Kerjasama Ekonomi Afro-Asia turut hadir dalam konferensi tersebut.

Apabila pada Konferensi Puncak negara-negara non-blok yang pertama di Belgrado (1961) masalah-masalah ekonomi sedikit sekali dikemukakan, maka Konferensi Puncak negara-negara non-aligned yang kedua di Kairo (1964) telah menghasilkan satu rumusan di bidang pembangunan dan kerjasama ekonomi di dalam bab yang tersendiri yaitu bab ke-X (walau pun belum belum terpisah) dari keseluruhan dokumen yang disebut "final document" dengan judul "the programme for peace and international co-operation".

Dalam Konferensi Puncak Negara-negara Non-Blok yang ke-3 di Lusaka (1970), barulah masalah-masalah ekonomi dirumuskan dalam dokumen tersendiri, terpisah dengan dokumen yang memuat masalah-masalah di luar ekonomi. Pada pertemuan Lusaka tersebut telah disahkan dua macam deklarasi satu adalah "declaration on peace, independence, developemnt, co-operation and democratization of international relations" dan yang lain berupa "declaration on non-alignment and economic progress". Kemudian pada konferensi puncak yang ke-4 berikutnya di Aljazair (1973) masalah-masalah ekonomi makin ditampilkan lagi. Maka lahirlah deklarasi ekonomi beserta program aksinya yang disahkan dalam konferensi tersebut.

Dari gambaran singkat tersebut dapatlah diketahui bahwa masalah-masalah ekonomi semakin menjadi perhatian utama. Jika dilihat dari situasi perkembangannya terutama pada periode tahun-tahun 1970-an, masalah-masalah ekonomi tersebut justru bisa membawa bibit-bibit yang mengakibatkan timbulnya pertentangan-pertentangan dan ketegangan-ketegangan baru. Negara-negara non-blok khususnya negara-negara sedang membangun pada umumnya dengan tegas berkesimpulan bahwa sistem ekonomi dunia yang berlaku sekarang telah gagal memecahkan masalah-masalah ketidak-adilan. Jurang yang semakin melebar antara negara maju dan negara berkembang sudah tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Oleh karena itu disusunnya Orde Ekonomi Internasional Baru sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. OEIB harus dapat menjamin perlakuan yang lebih "fair" dalam transaksi-transaksi ekonomi antar negara, lebih terbinanya kedaulatan masing-masing negara atas sumber-sumber ekonomi dalam negeri masing-masing, lebih ditingkatkannya lagi partisipasi negara-negara berkembang dalam proses produksi dan distribusi barang-barang di dunia, serta dipertahankannya kemerdekaan dan demokrasi dalam hubungan ekonomi internasional antar bangsa.

Sebaliknya negara-negara industri maju pada umumnya cenderung untuk mempertahankan "status quo", yakni mempertahankan sistem ekonomi yang sekarang berlaku, sebab sistem ini telah membuktikan kekuatannya dalam menunjang kemajuan dan kemakmuran. Apabila dewasa ini telah terjadi krisis-krisis ekonomi, hal itu bukan berarti bahwa prinsip-prinsip yang menjiwai sistem yang sekarang berlaku telah kehilangan kekuatannya. Jadi yang penting adalah bukan perombakan akan tetapi koreksi-koreksi, penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan-penyempurnaan.

Baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang sama-sama menyadari bahwa dialog dan kerjasama internasional adalah jalan yang paling baik untuk memecahkan kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi, bukan konfrontasi. Lebih-lebih semua negara sekarang menginsyafi bahwa oleh karena interdependensi ekonomi antar bangsa semakin tinggi, maka adalah jelas diperlukan kerjasama antar bangsa. Namun disadari pula terutama oleh negara-negara non-blok, negara berkembang pada umumnya, bahwa kerjasama yang dilandasi oleh ketidak-samaan, a-demokrasi dan kedaulatan semu, sudah tentu tidak akan berjalan baik, bahkan bisa berubah menjadi pertentangan dan ketegangan antar bangsa. Justru sistem dan struktur ekonomi



dunia yang sekarang berlaku ini tidak bisa dipertahankan lagi untuk dijadikan dasar kerjasama ekonomi internasional.

Perbedaan dasar antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam memandang ekonomi dunia dewasa ini dikhawatirkan akan menimbulkan "perang dingin" baru.

Gerakan non-alignment sebagai sesuatu kekuatan sebenarnya sudah sudah sejak lama mengadakan pengamatan tentang situasi perkembangan ekonomi dunia yang bisa menjurus kepada pertentangan dan ketegangan. Gerakan ini sampai sejauh sekarang ini belum merupakan gerakan yang ditunjang dengan adanya kekuatan materiil yang nyata, tidak seperti halnya dengan kekuatan yang dimiliki negara-negara yang tergabung ke dalam OPEC. Akan tetapi sebagai "moral force", gerakan non-alignment telah banyak memberikan sumbangan-sumbangannya yang positif di masa-masa lampau. Banyak resolusi-resolusi PBB beserta hasil-hasilnya dipengaruhi oleh gerakan non-alignment ini. Sebagian besar anggota PBB dari Asia, Afrika dan beberapa dari Amerika Latin juga bergabung dalam gerakan non-alignment. Di samping itu forum UNCTAD, gerakan Kelompok 77 dalam UNCTAD tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan gerakan non-alignment.

Satu hal yang perlu dicatat di sini ialah bahwa gerakan non-alignment bukan merupakan persekutuan yang mengikat dan tidak bisa memaksa anggota-anggotanya untuk mentaati keputusan-keputusan puncak dari gerakan non-alignment. Memang Setiap perhimpunan bangsa-bangsa (yang berhimpun secara internasional) seperti IMF, OECD, MEE yang sifatnya lebih mengikat, juga tidak bisa merenggut kemerdekaan dan kedaulatan negara anggotanya. Lebih-lebih gerakan non-alignment ini didukung oleh negara-negara yang mempunyai perbedaan baik di bidang sistem ekonomi, sosial maupun politik. Di sinilah letak permasalahan gerakan non-alignment yang hanya memiliki "moral force" dalam menghadapi kemelut dan kepincangan ekonomi dunia dewasa ini.

Ternyata pengalaman memberikan pelajaran kepada kita bahwa gerakan negara-negara sedang membangun di dalam memperjuangkan tuntutan-tuntutannya yang adil harus mempunyai kekuatan yang riil, baik hal tersebut didukung oleh adanya kekuatan materiil maupun berupa penggalangan

kekompakan dan solidaritas yang tinggi. Semuanya itu baru efektif apabila ada suatu tujuan atau kepentingan bersama yang hendak dicapai bagi negara-negara non-blok. Di sinilah kekurangannya gerakan tersebut.

Satu gagasan yang kiranya cukup mendapat perhatian luas di kalangan negara-negara berkembang ialah gagasan "collective self-reliance". Prinsip ini pada dasarnya mengandung arti tindakan bersama negara-negara berkembang dan negara-negara non-blok dalam perjanjian-perjanjian internasional untuk menjamin hak-hak ekonomi mereka melalui penggunaan kekuatan berunding secara bersama (collective bargaining strength). Dalam konferensi Kolombo telah diajukan suatu rumusan untuk mewujudkan collective self-reliance itu yaitu yang berupa tindakan-tindakan antara lain dalam bidang pengembangan sistem preferensi internasional yang mengizinkan ekspor dari suatu negara berkembang ke negara berkembang lainnya dengan bebas pajak, pengaturan clearing pembayaran-pembayaran khusus, usaha-usaha menciptakan orde ekonomi baru serta lembaga-lembaga baru. Keputusan-keputusan untuk mendirikan suatu dewan asosiasi produsen-produsen penghasil bahan mentah, dana khusus negara-negara berkembang untuk pembiayaan stock bahan-bahan mentah, pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, pusat informasi untuk perusahaan-perusahaan transnasional, pendirian Bank Komersial negara-negara berkembang serta informasi dan sistem penelitian merupakan langkah-langkah yang penting dan strategis bagi peranan masa depan gerakan non-alignment di bidang ekonomi.

## PENUTUP

Pertemuan puncak negara-negara non-blok di Kolombo akhir-akhir ini di mana jumlah negara-negara anggotanya semakin meningkat, menunjukkan bahwa gerakan non-alignment masih memainkan peranannya yang besar dalam hubungan internasional di dunia ini.

Sampai seberapa jauh efektivitas gerakan ini dalam memainkan peranannya untuk menciptakan pembangunan, perdamaian, kemerdekaan dan keadilan, tergantung pada sikap negara-negara yang bergabung pada gerakan tersebut dan sumbangannya untuk menjadikan gerakan ini kuat dan berwibawa.



Titik berat buat permasalahan dunia telah bergeser kepada bidang ekonomi. Gerakan non-alignment sebagai "moral force" nampaknya tidak kehilangan kekuatannya di dalam partisipasinya dalam memecahkan kesulitan-kesulitan ekonomi. Baik langsung maupun tidak langsung kekuatan gerakan non-alignment tetap disegani oleh negara-negara di dunia ini.

Pertemuan puncak yang pertama di Belgrado (1961) ternyata telah turut merintis jalan bagi didirikannya UNCTAD tahun 1964. Pertemuan Kairo (1964) telah memelopori perlunya menyusun kembali struktur ekonomi dunia yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi negara-negara berkembang yang dirasakan sangat mendesak. Kemudian pada konferensi puncaknya yang ke-3 di Lusaka perhatian di bidang ekonomi terutama ditujukan kepada bagaimana negara-negara non-blok dengan kemampuan mereka yang maksimal mengusahakan secara aktif terbinanya semangat "self-reliance". Semangat self-reliance ini dipertegas lagi dalam pertemuan puncak yang ke-4 di Aljazair (1973) yaitu melalui kekuatan kolektif di dalam menentukan posisi kekuatan berunding (bargaining) di forum internasional.

Akhirnya, pada konferensi puncaknya di Kolombo bulan Agustus tahun ini gerakan non-alignment mengakui adanya fase baru di dalam memainkan peranannya di forum internasional. Perjuangan gerakan non-alignment dalam fase baru ini adalah membangun Orde Ekonomi Internasional Baru. Gerakan ini yakin, dengan memandang potensi ekonomi yang semakin tumbuh dari negara-negara non-blok, negara-negara berkembang pada umumnya, bahwa perjuangan mereka akan berhasil.



## DAFTAR BACAAN

1. Leo Mates, Nonalignment: Theory and Current Policy, The Institute of International Politics and Economics, and Oceana Publications, Inc. Dobbs Ferry, New York, Belgrade, 1972.
2. A.S. Friedberg, The United Nations Conference on Trade and Development, Rotterdam University Press, Netherlands, 1970.
3. Netherlands National Committee for Development Strategy, UNCTAD .III: Symposium Report, The Hague, January 1972.
4. Susan Strange, "The Study of Transnational Relations", International Affairs, Vol. 52, No. 3, Oxford University Press, July 1976.
5. Bintoro Tjokroamidjojo, Peranan Kaum Cendekiawan Dalam Pembangunan, suatu kertas karya, 1975.
6. Documents of the Conference, "Economic Declaration", Review of International Affairs, Volume XXVII, Belgrade, 5 September 1976.
7. Laporan Delegasi RI ke Sidang Khusus ke-VII MU PBB, New York tanggal 1-16 September 1975.



# HABITAT DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN MANUSIA

Onny S. PRIJONO

## PENDAHULUAN

PBB menetapkan tahun 1976 sebagai Tahun Habitat. Dalam rangka tersebut PBB mengadakan konperensi mengenai lingkungan pemukiman manusia di Vancouver pada tanggal 31 Mei - 11 Juni 1976. Habitat mempunyai arti yang penting di dalam pemikiran tentang lingkungan pemukiman manusia terutama di masa mendatang oleh karena pendekatannya yang interdisipliner. Memang sejak beberapa tahun yang lalu, makin dikenal interdependensi antara berbagai aspek ekonomi dan perkembangan sosial dan mulai dikembangkan di banyak negara.

"Habitat" berasal dari bahasa Latin "Habitare". Kalau melihat arti katanya, Habitat berarti lingkungan fisik dari suatu lokasi yang dihuni oleh sekelompok manusia.<sup>1</sup> Jadi mempunyai relevansi dengan tempat tinggal atau pemukiman manusia. Ternyata bahwa habitat merupakan masalah yang kompleks, yang terdiri atas berbagai aspek yang saling kait mengkait. Habitat meliputi lingkungan sosial dan alam seperti: tempat pemukiman, tata masyarakat, sandang, pangan, lapangan pekerjaan, uang, produksi, distribusi, transportasi, kesehatan (menyangkut masalah polusi), pendidikan, kependudukan, sumber-sumber alam dan energi di mana masalah yang satu akan melibatkan masalah yang lain.

Habitat atau lingkungan pemukiman manusia selalu berada dalam konteks manusia untuk mencapai kesejahteraan serta menjamin kelangsungan hidupnya di mana terdapat perspektif terhadap masa depan. Di dalam konteks ini,

---

<sup>1</sup> Philip Rabcock Cove, *et.al.*, Webster's Third New International Dictionary (Springfield, Massachusetts: G. & C. Merriam Company, 1975, 2nd edition), hal. 1017

pada masa sekarang, manusia mulai merasa bahwa ia harus memperhatikan lingkungannya secara luas, mencakup bagaimana kebutuhan-kebutuhan manusia dapat terpenuhi serta bagaimana menghadapi perkembangan serta penyebaran penduduk di kemudian hari dengan berbagai implikasinya; maka timbullah masalah habitat sebagai suatu sintesa konsepsional.

## HUBUNGAN MANUSIA DENGAN DIRINYA

Manusia dilahirkan untuk hidup. Dan untuk dapat hidup ia harus berjuang. Maka kehidupan ini merupakan suatu perjuangan yang penuh dengan romantika serta dinamikanya. Ia harus berjuang untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Kehidupan ini menimbulkan kebutuhan bagi manusia di mana manusia berusaha serta berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhannya pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Maka di dalam perjuangan untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya timbul berbagai masalah yang saling kait mengkait. Masalah yang satu akan menimbulkan masalah yang lain dan begitu seterusnya. Sehingga kehidupan ini merupakan suatu teka-teki dan selalu akan menimbulkan masalah yang baru bagi manusia.

Kalau kebutuhan dapat terpenuhi pada manusia akan timbul kepuasan, ketenangan, ketenteraman baik jasmani maupun rohani yang pada akhirnya akan memberikan rasa kebahagiaan serta kesejahteraan. Jadi segala pemenuhan kebutuhan manusia, baik jasmani maupun rohani, selalu dikaitkan agar kehidupannya menjadi lebih berbahagia serta sejahtera. Oleh karena itu pada manusia selalu terdapat kecenderungan untuk hidup lebih layak. Akan tetapi ternyata dalam proses pemenuhan kebutuhan ini selalu terdapat hambatan-hambatan. Hal ini meminta seorang manusia untuk dapat mengatasinya. Kenyataan ini dapat menimbulkan berbagai macam sikap, seperti yang hedonistik ataupun yang retreatist. Timbul pembedaan antara golongan masyarakat yang kaya dan yang miskin, negara berkembang dan yang sedang berkembang.

Manusia sebagai individu selalu akan berusaha untuk mencari dan mendapatkan kebahagiaan di dalam dirinya, dan ini hanya dapat ditemukannya di dalam lingkungan di mana ia berada. Maka lingkungan menjadi aspek yang penting di dalam kehidupan manusia.



## HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA

Manusia sebagai individu yang dilahirkan untuk tidak hidup sendiri selalu berada dalam lingkungan di mana ada faktor alam dan manusia, dengan siapa manusia selalu mengadakan kontak dan komunikasi sehingga terjadi interaksi sosial. Di dalam hubungan interaksi sosial ini manusia terdorong untuk tidak hidup sendiri dan akan berkeluarga. Maka konsep "keluarga" makin mempunyai arti serta makna bagi kehidupan manusia.

Konsep keluarga lama kelamaan mengalami perubahan, dari keluarga luas (extended family) cenderung menjadi keluarga batih (nuclear family). Di mana suatu rumah yang tadinya ditempati oleh beberapa keluarga lama kelamaan lingkaran ini menyempit dan cenderung untuk ditempati satu keluarga saja. Sehingga sifat yang tadinya kolektif akan cenderung untuk menjadi lebih individualistis yang terbatas pada lingkaran keluarga intinya. Gejala ini terutama tampak di kota-kota besar di mana sifat yang individualistis biasanya merupakan ciri masyarakat perkotaan.

"Keluarga" dan "rumah" bukanlah identik sama akan tetapi mempunyai kaitan yang sangat erat satu sama lainnya, atau dapatlah dikatakan saling melengkapi. Karena sering dikatakan bahwa sebuah rumah an sich belum lengkap apabila belum ditempati atau dihuni oleh sebuah keluarga yang memberi arti serta isi kepada rumah tersebut. Sehingga keluarga menjadi bagian yang konstitutif dari rumah.

Orang yang telah berkeluarga selalu terdorong untuk mencari tempat bermukim bagi keluarganya, yang dapat memberikan perlindungan serta rasa aman, tenteram dan bahagia bagi keluarganya. Sebagai akibat kecenderungan ini maka jumlah pemukiman manusia akan naik secara kuantitatif dan akan membawa problem baru bagi masyarakat. Seperti juga dikemukakan oleh Barbara Ward, krisis pemukiman manusia timbul dari luas dan rumitnya perubahan di mana tempat tinggal harus dicari. Sehingga persoalannya benar-benar merupakan masalah kuantitas di samping krisis pemukiman manusia dapat juga diutarakan dalam arti kualitatif. Juga dikatakan bahwa pada umumnya pemukiman perkotaan bertumbuh dua kali lipat cepat daripada bertumbuhnya kependudukan.

Kota-kota besar dengan lebih dari setengah juta penduduk bertumbuh dengan kecepatan dua kali lipat lagi. Krisis kuantitas itu dapat diutarakan dalam arti pembangunan gedung. Pada umumnya, gedung-gedung yang akan dibutuhkan dalam tigapuluhan tahun mendatang ini lebih banyak daripada yang pernah dibangun dalam seluruh sejarah umat manusia sebelumnya. Diramalkan bahwa dalam duapuluh tahun mendatang, penduduk kota akan memerlukan perumahan serta tempat-tempat bekerja dalam jumlah yang sama dengan banyaknya semua bangunan yang terdapat di daerah-daerah yang sudah maju selama dua abad terakhir ini.<sup>1</sup>

Masalah pokok yang dihadapi di dalam kaitan hubungan antar manusia adalah mengenai pertambahan penduduk yang laju dengan pesat serta penyebaran penduduk yang tidak merata dalam arti ada daerah-daerah yang sangat padat penduduknya serta ada pula yang jarang sekali. Terutama mengenai pertambahan jumlah penduduk merupakan masalah utama dan kompleks oleh karena mempengaruhi sektor lainnya seperti pangan, sandang, pendidikan dan tempat pemukiman. Apabila kita berdasarkan asumsi bahwa akan ada penurunan tingkat kesuburan sebesar 25%, maka penduduk Indonesia pada tahun 2000 akan berjumlah sekitar 250 juta jiwa lebih. Dari jumlah 250 juta jiwa penduduk tersebut, diperkirakan 146 juta bermukim di pulau Jawa dan Madura. Ini berarti bahwa kepadatan penduduk akan mencapai 1.105 jiwa per kilometer persegi, yang merupakan suatu tingkat kepadatan penduduk yang luar biasa. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo membayangkan pulau Jawa pada tahun 2000 sebagai suatu "pulau kota".<sup>2</sup> Di mana hal tersebut tentunya akan membawa problema yang baru seperti masalah tanah, tempat pemukiman, kesehatan dan pendidikan.

Dengan bertambahnya penduduk secara kuantitatif maka bertambah pula pemenuhan kebutuhan terutama kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, tempat pemukiman dan pendidikan. Menurut Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, mengingat kekurangan penggunaan kalori (calory intake) yang dihadapi oleh penduduk pada dewasa ini serta peningkatan yang berlipat ganda kebutuhan

---

<sup>1</sup>Barbara Ward, "Permukiman manusia: Krisis dan Kesempatannya", *Titian* (Nomor 18), hal. 65-66

<sup>2</sup>Sumitro Djojohadikusumo, "Indonesia menuju Tahun 2000", *Prisma* (No. 2, April 1975, Tahun IV), hal. 17



penduduk akan pangan, maka mulai sekarang sampai tahun 2000 kebutuhan konsumsi pangan akan meningkat dengan 120 persen. Untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dibutuhkan peningkatan produksi bahan pangan secara intensif dan ekstensif. Hal tersebut dapat dilaksanakan di daerah-daerah di luar pulau Jawa, di mana masih tersedia tanah yang cukup luas dan belum tergarap. Kita sudah harus mulai dari sekarang memberikan fokus perhatian terhadap daerah-daerah di luar pulau Jawa mengingat bahwa di masa mendatang pulau Jawa akan banyak tergantung kepada daerah-daerah lainnya oleh karena mempunyai jumlah penduduk yang terpadat dibandingkan dengan kepulauan lainnya.

Di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akan pangan harus diperhatikan pula mengenai gizi, terutama bagi anak-anak yang masih dalam taraf pertumbuhan serta perkembangan. Untuk hal tersebut masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan mengenai gizi makanan serta kesehatan sosial (social hygiene). Faktor kesehatan perlu diperhatikan, terutama di dalam masa pembangunan, oleh karena peningkatan kesehatan masyarakat akan menguntungkan proses ekonomi masyarakat dan karenanya meningkatkan tenaga kerja yang merupakan eksponen utama bagi pembangunan. Di dalam proses peningkatan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan tidak saja meliputi pembangunan rumah-rumah sakit serta penambahan jumlah tenaga medis tetapi juga harus meliputi pendidikan kesehatan masyarakat yang menyangkut soal keluarga berencana, gizi dan kesehatan (hygiene).

Dengan menyadari pentingnya peranan pendidikan terutama dalam masa pembangunan, maka dibutuhkan fasilitas pendidikan yang tidak saja terdiri atas jumlah gedung bangunan sekolah tetapi juga jumlah guru yang baik. Karena dengan makin pesatnya pertumbuhan masyarakat, maka makin besar pula tuntutan akan fasilitas dan kesempatan pendidikan. Di dalam hal ini pemerintah telah menetapkan sebagai sasaran penyediaan agar tersedia fasilitas pendidikan yang dapat menampung anak-anak dalam angkatan usia 7-13 tahun sampai dengan tahun 2000. Untuk dapat mengimbangi pertambahan jumlah gedung sekolah selain harus diadakan peningkatan tenaga pengajar secara kuantitatif juga harus diadakan peningkatan secara kualitatif sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan. Pendidikan tidak saja meliputi pendidikan



formil tetapi juga harus non-formil. Oleh karena itu ditrapkan azas pendidikan seumur hidup, yang didapat baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Di dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya atau dalam hubungan kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, ada kalanya timbul konflik, yang secara ekstreem akan dimanifestasikan dalam wujud perang. Akan tetapi manusia menyadari bahwa peperangan bukanlah merupakan jalan ke luar yang dapat menyelesaikan permasalahan tetapi lebih bersifat destruktif bagi manusia maupun lingkungannya. Maka timbullah gagasan perdamaian dan dicari keseimbangan di dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pada masyarakat Jawa misalnya dikenal sistem gotong royong, musyawarah dan mu-fakat, di Bali dikenal subak, yang kesemuanya itu mempunyai kecenderungan ke arah kesejahteraan masyarakat serta perdamaian.

Sebagai akibat sejarah terdapat perkembangan negara yang berbeda-beda. Ada yang lebih maju, sedang berkembang dan ada pula yang belum berkembang. Sehingga ada yang berpendapat bahwa penyebab utama krisis pemukiman manusia adalah karena ketidak samaan dalam proses perkembangan ini.<sup>1</sup> Peperangan telah merusak lingkungan termasuk faktor manusia dan alamnya. Kehancuran lingkungan fisik yang ditimbulkan oleh peperangan mengakibatkan beribu-ribu orang kehilangan tempat bermukimnya. Pembangunan kembali suatu kota yang hancur akibat peperangan, termasuk lingkungan pemukiman terjadi lebih cepat daripada perencanaannya. Hal mana dapat mengakibatkan terciptanya suatu sistem tata kota yang kurang teratur. Atau suatu kesalahan sistem pembangunan dapat terulang kembali.

Sebagai akibat perkembangan serta kemajuan teknologi yang tidak merata, maka ada penduduk yang memiliki pemukiman dan ada pula yang tidak memiliki pemukiman yang layak dan patut. Sehingga timbullah masalah pemukiman manusia: siapa yang bertanggung jawab atas ini, di manakah letak halangannya, siapa yang harus membangun pemukiman bagi penduduk yang tidak mampu, siapa yang harus diberi subsidi, bagaimana teknik membangun

---

<sup>1</sup>A group of experts, *A Habitat Special Report, Dubrovnik: An Analysis of the Crisis in Human Settlements* (Habitat secretariat, May 1975), hal. 1

perumahan murah, siapa yang berhak menempati dan memperoleh prioritas utama, dan masih banyak masalah lainnya. Masalah pemukiman manusia akan menelurkan banyak masalah lainnya, terutama di masyarakat yang sedang berkembang di mana kesejahteraan sosialnya belum merata.

Masalah pokok yang dihadapi di dalam hubungan manusia dengan manusia mengenai kependudukan, yaitu pertambahan penduduk yang meningkat sangat laju serta distribusi penduduk yang tidak merata. Masalah kependudukan ini menuntut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang pertama-tama adanya peningkatan konsumsi dalam kuantitas serta distribusi yang makin meluas. Kemudian peningkatan dalam kualitas sebagai akibat kemajuan dalam bidang pengetahuan, pendidikan, teknologi serta kenaikan pendapatan masyarakat. Peningkatan konsumsi terutama akan menimbulkan masalah-masalah seperti pangan, sandang, tempat pemukiman, kesehatan, pendidikan, sumber-sumber alam dan energi. Sedangkan peningkatan di dalam distribusi akan menimbulkan masalah-masalah transportasi, komunikasi, sarana-sarana dan yang tentunya juga banyak kaitannya dengan kemampuan daya beli masyarakat sebagai konsumen.

Menghadapi masalah kependudukan ini pemerintah antara lain telah mengambil kebijakan menggencarkan program keluarga berencana mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Serta merangsang usaha migrasi dan transmigrasi, walaupun hasilnya memang belum terlalu memuaskan. Di dalam rangka usaha-usaha pemerintah tersebut ternyata bahwa pendidikan masyarakat penting sekali. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi telah dilaksanakan politik pembangunan. Sedangkan untuk melancarkan distribusi yang meluas dan merata diperlukan pembangunan sistem sosial.

## HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAMNYA

Kalau kita melihat kembali kepada sejarah maka orang hidup mengembara dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan tujuan untuk menyambung kehidupannya serta untuk mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Sebagai akibat perkembangan teknologi manusia mulai menyadari bahwa sistem kehidupan seperti ini tidak menguntungkan di samping terdesak pula



oleh perkembangan serta penyebaran penduduk laju dengan sangat pesatnya. Perkembangan serta kemajuan teknologi telah banyak mempengaruhi serta mengubah kehidupan manusia terutama di dalam pengembangan sumber-sumber alam dan sumber daya manusia.

Di lingkungan di mana manusia akan hidup menetap, ia mengharapkan dapat memenuhi kebutuhannya baik jasmani maupun rohani. Tempat ia menetap dan bermukim merupakan harapan kehidupannya. Di dalam proses sedentarisasi ini manusia harus lebih memikirkan dan menangani alam sekitarnya, baik lingkungan fisiknya maupun sumber-sumber alam serta energi yang terkandung di dalamnya. Di dalam hubungan manusia dengan alamnya, manusia berusaha untuk menguasai alamnya demi kepentingannya. Interaksi antara manusia dengan alam sekitarnya turut menentukan kesejahteraan. Alam dapat menjadi faktor penghambat bagi manusia; ia menjadi opositif terhadap manusia. Alam dapat pula menjadi faktor penunjang yang asosiatif.

Di dalam proses sedentarisasi untuk melindungi dirinya dari alam maka manusia akan mencari tempat bermukim di mana ia dapat merasa dirinya aman, tenteram dan terlindung. Pemukiman manusia merupakan pencerminan hasil kebudayaannya. Orang Eskimo membangun iglo dan orang Minangkabau membangun rumah gadang. Seringkali dikatakan bahwa sebuah rumah tinggal mencerminkan identitas orang yang menghuninya. Maka nyata sekali kaitan yang erat antara rumah tempat tinggal dengan orang yang menghuninya.

Di dalam pembangunan pemukiman manusia, alam merupakan unsur yang penting. Manusia harus memperhatikan antara lain faktor tanah, iklim, sumber-sumber alam dan energi, air, fauna serta floranya. Terutama di dalam menghadapi usaha mengatasi masalah kebutuhan pangan dan makin meningkatnya pertambahan jumlah penduduk, maka perlu sekali diadakan penelitian dan evaluasi yang seksama terhadap mutu tanah, terutama di tanah-tanah yang akan digarap, khususnya untuk kemungkinan pertanian sawah atau produksi padi. Oleh karena diramalkan bahwa di masa mendatang pulau Jawa akan banyak tergantung kepada kepulauan lainnya maka usaha ini perlu dilakukan terhadap tanah-tanah di luar pulau Jawa yang masih luas dan belum tergarap. Pengetahuan serta penerapan kemajuan teknologi memegang

peranan yang penting di dalam soal penggarapan tanah terutama di dalam proses menaikkan produksi pangan. Dengan menyadari pentingnya produksi bagi pemenuhan konsumsi yang makin meningkat, maka di daerah-daerah di mana pertanian sawah tidak mungkin dilakukan harus dicari kemungkinan pengembangan sumber-sumber perikanan serta usaha perikanan darat misalnya.

Sebagai akibat perkembangan serta penyebaran penduduk, terutama karena urbanisasi, yang meningkat dengan sangat pesatnya maka penyediaan tanah akan menjadi makin langka serta akan mempengaruhi harga tanah yang makin melonjak naik. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi pembangunan pemukiman manusia. Oleh karena sudah dapat diramalkan serta dipastikan bahwa laju kenaikan jumlah penduduk serta meluasnya industrialisasi di kota-kota besar maka permintaan akan tanah tentu juga akan makin meningkat terus. Maka hal ini menuntut agar dilakukan pembagian lingkungan daerah (zoning) menurut fungsinya serta perencanaan tata ruang (spatial planning). Sebab apabila hal ini tidak dilakukan maka harga tanah akan sukar terkendalikan sebagai akibat dari permintaan yang terus menerus meningkat.

Terutama di negara-negara yang menghadapi masalah tanah, pembangunan pemukiman manusia tidak dapat lagi menyebar secara horizontal akan tetapi harus beralih dengan pembangunan pemukiman ke atas sebagai akibat dari efisiensi tanah dan pertimbangan yang lebih ekonomis sehingga timbullah flat-flat serta apartemen-apartemen. Di dalam hal ini adakah faktor sosial telah cukup mendapat perhatian?

Masalah tanah yang paling rumit dihadapi adalah penyediaan tanah bagi mereka yang berpenghasilan rendah terutama di kota-kota besar. Apalagi bagi mereka yang terkena penggusuran karena pembangunan suatu proyek atau terkena jalur hijau, sehingga harus dipindahkan ke daerah yang lain, di mana harga tanahnya masih relatif cukup murah dengan fasilitas yang memadai seperti sanitasi lingkungan yang sehat, air minum, sekolah, tempat belanja dan sarana angkutan yang murah. Masalahnya adalah bahwa tanah yang murah hanya terdapat di pinggiran dan jauh dari pusat kota. Sedangkan apabila tidak ada sarana angkutan umum yang cukup banyak dan murah, maka kedudukan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang biasanya tinggal di pinggiran kota akan makin sulit dan terpojokkan.



Di dalam hubungan manusia dengan alamnya, masalah lain yang lebih penting adalah persediaan air, terutama bagi masyarakat kota. Kebutuhan akan air bersih sekarang diperkirakan sebanyak 86 liter per hari untuk tiap jiwa masyarakat kota. Sedangkan menurut sebuah penelitian di Singapura menunjukkan bahwa untuk kawasan Asia Tenggara paling sedikit dibutuhkan 90 liter per jiwa per hari.<sup>1</sup> Oleh karena itu disarankan bahwa untuk duapuluh lima tahun mendatang, kota-kota sepanjang pantai utara pulau Jawa terutama sekitar Jakarta dan Surabaya harus membangun suatu sistem konservasi air yang sempurna sehingga mampu untuk mengontrol arus air di lapisan bawah tanah maupun arus air di permukaan tanah. Di samping itu dengan makin meningkatnya kebutuhan penyediaan air bagi masyarakat kota, akan timbul persoalan pula bagi penyediaan air untuk keperluan irigasi pertanian. Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan akan air maka perlu dilakukan penghematan konsumsi air, khususnya bagi masyarakat kota. Berhubung dengan kelangkaan persediaan air serta meningkatnya harga air, harus diusahakan investasi dalam hal proses pengolahan kembali mengenai air (water-cycling system).

Dunia pengetahuan serta teknologi selama ini telah mengalami kemajuan yang pesat sekali sehingga manusia dapat menguasai serta memanfaatkan alam sekelilingnya. Akan tetapi dalam hal ini perlu dijamin serta dijaga kelestarian flora maupun faunanya. Di dalam habitat faktor penghijauan perlu sekali. Hutan-hutan harus dilindungi, penebangan kayu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang untuk dapat mencegah erosi, dan perlu diadakan reboisasi. Begitupun mengenai faunanya agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang maka harus diadakan konservasi untuk mencegah kepunahan. Walaupun manusia sudah dapat menguasai serta memanfaatkan alam demi kepentingannya, ia harus menjaga kelestarian alamnya, baik fauna maupun floranya. Ini dapat diterangkan di dalam tata masyarakat yang berlaku dan ditaati oleh setiap anggotanya secara sadar.

Faktor iklim juga harus diperhatikan di dalam pembangunan pemukiman manusia, tanpa mengabaikan syarat-syarat kesehatan. Oleh karena itu kita tak dapat mengambil model pembangunan pemukiman dari daerah ataupun negara lain begitu saja. Lebih sukar lagi untuk mendapatkan suatu model pembangunan pemukiman yang universal dan murah.

---

<sup>1</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *op. cit.*, hal. 19

Faktor lain yang harus diperhatikan terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang adalah sumber-sumber alam maupun energi yang terkandung di dalam tanah, agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi pembangunan. Yang harus diperhatikan adalah agar sumber-sumber alam maupun energi tersebut tidak tertutup atau terselubung oleh pembangunan fisik. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perencanaan pada tingkat nasional, regional dan lokal yang terintegrasi dalam perencanaan ekonomi nasional dan sosial. Akan tetapi, di sinipun kita akan menghadapi masalah bahwa pembangunan fisik akan lebih cepat menyebar daripada pembuatan suatu perencanaan tata kota.

Di dalam menghadapi alam manusia berusaha untuk dapat memanfaatkan serta menguasai alam sekitarnya terutama guna memenuhi kebutuhannya. Maka faktor produksi menjadi penting sebagai motivasinya. Untuk dapat meningkatkan produksi dibutuhkan pengetahuan serta teknologi. Akan tetapi di dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup, manusia juga harus berorientasi ke masa yang akan datang dengan menyadari akan faktor kelangkaan. Oleh karena itu manusia harus menciptakan suatu kelestarian yang dapat menjamin hubungan antara manusia dengan alamnya, hal mana dituangkan di dalam tata masyarakat.

## MANUSIA DAN HABITATNYA

Uraian di muka menunjukkan bahwa manusia selalu berada dalam lingkungan yang terdiri atas faktor manusia dan alam, dengan siapa manusia selalu mempunyai hubungan timbal balik. Di lingkungan di mana ia bermukim ia mengharapkan dapat hidup berbahagia, baik fisik maupun psikik. Maka timbullah masalah habitat ini di mana manusia menjaga suatu keseimbangan serta keserasian dalam hubungannya dengan manusia lainnya maupun dengan alam sekitarnya.

Hal tersebut makin rumit dengan bertambahnya jumlah penduduk secara laju sehingga menyebabkan masalah pemukiman menjadi hal yang patut dipikirkan. Terutama di negara-negara yang sedang berkembang hal tersebut bertambah sulit karena menghadapi masalah kekurangan



serta keterbatasan modal dan dana yang tersedia bagi pembangunan perumahan khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Gejala tersebut makin rumit lagi dengan makin bertambahnya arus urbanisasi. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya untuk membentuk suatu habitat yang baik memang bukan masalah yang sederhana. Tetapi merupakan masalah yang kompleks, berkembang terus dan mempunyai banyak implikasi lainnya.

Di dalam proses pemenuhan kebutuhan manusia, dibutuhkan infrastruktur yang mantap, terutama pembangunan gedung-gedung (sekolah, pabrik, gudang, dan lain-lain) dan jalan-jalan yang dapat melancarkan sistem pemasaran dan distribusi. Sarana pengangkutan laut maupun udara dari daerah-daerah produksi ke konsumsi adalah penting, mengingat geografis Indonesia yang terdiri atas kepulauan yang terpisah jauh satu sama lainnya dan mengingat bahwa di masa mendatang orientasi dari darat akan berpindah ke laut di mana laut akan banyak diambil kemanfaatannya baik sebagai sumber kekayaan alam maupun sebagai penghubung antar pulau di suatu negara maritim seperti Indonesia.

Untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dalam lingkungan pemukiman ini misalnya faktor kesehatan perlu diperhatikan, baik kesehatan fisik maupun psikik. Maka kebersihan maupun kesehatan masyarakat dalam lingkungan pemukiman manusia menjadi perhatian dan orang mulai membicarakan serta memikirkan mengenai polusi sampah, air, udara, suara, dan lain-lain sebagai akibat dari perkembangan serta kemajuan teknologi. Lingkungan pemukiman manusia dengan jumlah penduduk yang terlalu padatpun tidak merupakan lingkungan yang sehat. Jadi fokusnya mulai beralih dari kesehatan individu kepada kesehatan lingkungan yang tentunya juga mempunyai pengaruh terhadap individu yang tidak terlepas dari lingkungannya.

Sebagai salah satu akibat proses urbanisasi terjadi kepadatan penduduk serta masalah transportasi yang seringkali menimbulkan kemacetan lalu lintas dalam suatu kota. Maka di dalam pembentukan suatu perencanaan mengenai transportasi perlu dipertimbangkan mengenai lingkungannya, suara, vibrasi/getaran, polusi udara dan lain-lain. Sebagai akibat perkembangan kota yang menyebar dengan sangat pesatnya maka penggunaan transportasi serta energi seringkali kurang efisien. Misalnya di kota-kota besar, pusat perdagangan biasanya terletak di pusat kota sedangkan daerah pemukiman



biasanya agak di pinggir kota atau terletak sangat jauh dari pusat. Atau sebaliknya, tinggal di daerah "slum" di pusat/di tengah kota. Jadi sebagai akibat perkembangan ini maka seseorang yang mau berangkat ke tempat kerjanya tidak saja membutuhkan waktu yang beberapa kali lebih lama tetapi juga membutuhkan waktu yang beberapa kali lipat lebih jauh.

Di negara-negara yang lebih maju, untuk mengatasi permasalahan ini telah diusahakan pembangunan pusat serba guna (multipurpose center), atau pembangunan unit terencana. Yaitu merupakan suatu pusat di mana terdapat apartemen, perkantoran, toko-toko dan tempat-tempat rekreasi yang menarik penambahan jumlah transport di dalam lingkungan pusat tersebut dengan harapan dapat mengurangi arus lalu lintas di luar pusat tersebut. Langkah ini mempunyai dua efek. Pertama, jarak yang ditempuh relatif singkat sehingga menstimulir orang untuk berjalan kaki dan tidak mempergunakan kendaraan. Kedua, apabila kota dikembangkan dalam sejumlah multipurpose centers, maka arus lalu lintas di luar akan lebih mudah untuk dapat diorganisir serta ditertibkan melalui rute-rute lalu lintas tertentu serta menggunakan sistem lalu lintas antar kota untuk dapat memecahkan masalah transportasi bagi kota.

Apabila masyarakat kota mengikuti saja pola perkembangan teknologi transportasi secara membabi buta maka masyarakat akan berkembang tak terarah, baik dalam bentuk maupun dalam ukurannya. Oleh karena itu transportasi dan energi tidak saja membutuhkan strategi agar lalu lintas dapat lancar tetapi juga strategi pola perkotaan dengan memperhatikan kondisi di mana lalu lintas tersebut bergerak.

Di dalam habitat di mana terdapat faktor manusia dan alam, manusia selalu akan berusaha untuk mencari keseimbangan serta keserasian antara dirinya dengan habitatnya. Oleh karena manusia makin berorientasi ke masa depan dan memiliki kecenderungan ke arah kehidupan yang lebih layak maka permasalahan ke arah kehidupan yang lebih layak maka permasalahan habitat ini menjadi semakin penting bagi manusia.

## PENUTUP

Konsep Habitat menunjukkan bahwa manusia menyadari betapa pentingnya memandang pemukiman sebagai lingkungan kesejahteraan kehidupan manusia. Seringkali dikatakan bahwa pemukiman merupakan refleksi dari suatu masyarakat. Di dalam Konperensi Habitat yang berlangsung di Vancouver, tidak diusulkan, dan memang juga tidak dimungkinkan tercapainya suatu pola pembangunan pemukiman manusia yang bersifat universal. Akan tetapi apa yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan adanya suatu perencanaan makro teritorial nasional dengan memperhatikan peranan pemukiman manusia dalam strategi pembangunan nasional.

Oleh Enrique Penalosa<sup>1</sup> dikemukakan bahwa perencanaan teritorial tidak akan merupakan suatu langkah yang revolusioner tetapi lebih merupakan suatu peleburan sistem-sistem yang terdahulu sehingga menjadi sesuatu yang wajar, logis dan korektif. Apabila di waktu-waktu yang lalu kita lebih mendasarkan perencanaan sosial atas azas ekonomi tanpa memperhatikan (mengabaikan) faktor sosial, lingkungan ataupun keseimbangan regional, maka sekarang kita menyadari bahwa pembangunan tidak saja ditentukan oleh GNP maupun produksi bagi kepentingan produsen. Suatu perencanaan teritorial harus dapat mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta aspek regional yang berpangkal pada perkembangan serta distribusi penduduk serta faktor pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini akan menentukan garis-garis pokok jangka panjang serta pemberian prioritas program daerah tersebut seperti mengenai perkembangan serta distribusi penduduk, pembiayaan serta penentuan lokasi industri dasar, penentuan pemberian prioritas perkembangan daerah, prioritas penggunaan tanah regional, perkembangan sistem komunikasi dan transportasi nasional. Bentuk perencanaan teritorial ini akan berbeda menurut kebutuhan nasional. Terutama bagi negara-negara yang menghadapi masalah pelipat-gandaan jumlah penduduk dalam satu generasi, sudah harus mulai merencanakan dari sekarang di mana penduduknya akan tinggal serta bagaimana mereka ke tempat kerja, dapat makan dan

---

<sup>1</sup>Enrique Penalosa adalah Sekjen Konperensi PBB mengenai Habitat. Lihat Enrique Penalosa, "Toward A New Development Model", Economic Impact (No. 14, Vol. 2, 1976), hal. 15-16



tinggal. Mulai dari sekarang kita sudah harus merumuskan suatu kebijakan penduduk yang lebih didasarkan atas rangsangan daripada atas paksaan. Kita harus menemukan jalan yang dapat menyeraskan perkembangan sektoral dengan keseimbangan regional. Di dalam merencanakan pemukiman manusia kita harus lebih menyadari akan sumber-sumber alam serta tak lupa harus memperhatikan lingkungan sekitarnya termasuk segala polusinya.

Faktor kedua yang harus diperhatikan dalam pembentukan suatu model pembangunan adalah dengan melihat habitat manusia sebagai suatu kerangka kerja strategi pembangunan. Perencanaan territorial merupakan pembangunan yang harus dilihat dalam dimensi ini. Harus diusahakan agar kebijakan pemukiman manusia dapat menciptakan suatu dimensi perkembangan yang baru. Motor bagi perkembangan model pembangunan di masa mendatang dapat terpusat pada konstruksi dan modernisasi pemukiman manusia, termasuk usaha besar-besaran dalam perumahan, transportasi, penyediaan energi serta jasa-jasa fisik lainnya.

Akan tetapi kita tentu juga menyadari bahwa perencanaan territorial serta strategi pembangunan pemukiman manusia tidak begitu saja akan dapat memecahkan semua permasalahan ekonomi terutama yang dihadapi oleh dunia ketiga. Kita hanya dapat berpedoman bahwa pembangunan harus sedemikian rupa sehingga memberikan prioritas pertama kepada perbaikan kehidupan seluruh manusia.





ECONOMIC DECLARATION\*

I. INTRODUCTION

The Heads of State or Government of Non-Aligned countries consider that economic problems have emerged as the most acute problems in international relations today. The crisis of the world economic system continues to assume ever-growing proportions. Developing countries are the victims of this worldwide crisis which severely affects political and economic relations. The widening of the gap between developed and developing countries is one of the most threatening sources of tensions and conflicts. It is increasingly evident that the existing system cannot ensure the promotion of the development of the developing countries and hasten the eradication of poverty, hunger, sickness, illiteracy and also the social scourges engendered by centuries of domination and exploitation. Thus the establishment of the New International Economic Order is of the utmost political importance. The struggle for political and economic independence, for the full sovereignty over natural resources and domestic activities and for the greater participation of developing countries in the production and distribution of goods, and the rendering of services and basic changes in the international division of labour assumes the highest priority. Breaking up of the resistance to the struggle for the new order represents the primary task of the Non-Aligned and other developing countries. The elimination of foreign aggression, foreign occupation, racial discrimination, apartheid, imperialism, colonialism and neo-colonialism and all other forms of dependence and subjugation, interference in international affairs, domination and exploitation are crucial to the economics of Non-Alignment.

---

*\*Document of the Fifth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, Colombo, August 16-19, 1976.*

## II. THE STRUGGLE FOR LIBERATION AND INDEPENDENCE

1. The Heads of State or Government of Non-Aligned Countries noted the successes of developing countries in mobilizing their natural resources as an effective weapon to defend their national security, sovereignty and existence, and in promoting their collective struggle against foreign aggression and occupation, racial discrimination, alien domination, apartheid, Zionism and colonialism which are the greatest threat to world peace and security. This has been amply demonstrated by the triumphs of this struggle in Africa, the Middle East and Asia and in the effective measures taken by the oil exporting countries and other developing countries producers of raw materials to safeguard and control their natural resources.

2. It is the duty of all States and peoples to work individually and collectively to eliminate those practices and to extend effective support and assistance to the peoples, countries and territories subjected to them, so as to put an immediate end to those major obstacles to their freedom and legitimate aspirations, and in order to promote development and international co-operation, peace and security.

Furthermore, these peoples, countries and territories have the right to restitution and full compensation for the exploitation, depletion of and damages to their natural and all other resources in accordance with the principles of the Declaration on the Establishment of a New International Economic Order, the Charter of Economic Rights and Duties of States and the Dakar Declaration. No State may promote investments that may obstruct or affect the right to political and economic sovereignty and independence of peoples, countries and territories subjected to foreign occupation or domination.



### III. THE PRESENT INTERNATIONAL ECONOMIC SITUATION AND THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPING COUNTRIES

1. The Heads of State or Government of Non-Aligned countries are deeply perturbed by the glaring inequalities and imbalances in the international economic structure and the ever widening gap between the developed and developing countries. Numerous resolutions were adopted at various international fora concerning the establishment of the New International Economic Order. However, no indication of their implementation is apparent. Despite the growing acceptance of the principles of the New International Economic Order, there has been minimal progress towards their implementation.

2. The developing countries, and particularly the Least Developed, Land-Locked, Island Developing and other geographically disadvantaged countries, and the Most Seriously Affected countries, are facing an acute crisis both with regard to the attainment or maintenance of minimal living standards of their peoples and their prospects of development. Over the years the economic situation of most developing countries, specially the Least Developed, and the Most Seriously Affected countries has continued to deteriorate and the resultant debt burdens on these countries have reached intolerable levels.

3. The foreign exchange earnings of the developing countries depend basically on their exports of raw materials and primary commodities. The relative improvement of the level of prices of some of these commodities in 1973/1974, which was shortlived, did not at all compensate for the deterioration in their terms of trade which characterized the post-war period. The decline in their real value is continuing and is today assuming disquieting proportions as a result of the staggering rise in the prices of manufactured goods, foodstuffs, capital goods and services imported by the developing countries. This situation is seriously affecting the efficacy of their efforts and puts a brake on their development.

4. Despite the continuing assurances given by the developed countries to relax and eliminate barriers to trade for the products of developing countries, progress so far has not been satisfactory. However it should

be noted that the agreements concluded between some developed countries and developing countries constitute a sign of hope in this field. The Generalized Scheme of Preferences though a useful scheme of trade liberalization needs substantial improvement. Its limited coverage, particularly in respect of products of export interest to developing countries and especially the Least Developed countries and its temporary nature are a matter of major concern. Progress in the Multilateral Trade Negotiations has been slow and their focus has been narrow. Furthermore, with the exceptions of a few forward looking developed countries there has been no genuine attempt on the part of the developed countries to re-organize and reform the existing inequitable and unbalanced world trade systems to conform to the urgent development requirements and priorities of the developing countries.

5. There has been a phenomenal rise in the deficit in the balance of payments of developing countries which had increased from about \$ 12.2 billion in 1973 to \$ 33.5 billion in 1974 and to over \$ 40 billion in 1975. Some estimates indicate that this figure could reach \$ 112 billion by 1980 given the present trends. This unprecedented situation is not the product of conjunctural factors, but the reflection of the structural crisis that characterizes the present economic relations which originates in the colonial and neo-colonial policy of imperialism. As a result most developing countries have over the years run down their reserves, accumulated large external debts, a good portion of which carries heavy interest and amortization obligations. It has been estimated that the external indebtedness of these countries which was over \$ 100 billion in 1973 will double itself by the end of 1976.

6. The continuing diversion of human and material resources from peaceful economic and social pursuits to an unproductive and wasteful arms race, particularly in the field of nuclear and other weapons of mass destruction, not only heightens the current grave crisis in world economy but also frustrates the purposes and objectives of both the Disarmament Decade and the Second United Nations Development Decade which envisaged a transfer of substantial resources from the developed countries to the developing countries through disarmament. The flow of



financial resources to the developing countries amounted to only about \$ 20 billion in 1975 in contrast to the expenditure on armaments that has been increasing at a phenomenal rate and has now reached the staggering figure of \$ 300 billion per annum. The Heads of State or Government of the Non-Aligned countries reaffirm that much of the development requirements of developing countries would be met if a substantial part of the resources freed by measures in the field of disarmament by the main world military Powers could be used to promote the economic development of developing countries. Such measures would certainly contribute towards a bridging of the gap between developed and developing countries within the foreseeable future.

7. Industrialization is a dynamic instrument of development for the social and economic progress of the developing countries. It is also linked to the promotion and expansion of trade not only amongst the developing countries but also with the expansion is not thwarted. The redeployment of appropriate industries and the provision of the necessary support for building up a sound technological base in the developing countries should be expedited. The monopoly of technology processes by developed countries has led to several unsatisfactory features which call for immediate substantive and institutional remedial action if transfer of technology is to be effected in order to achieve the targets set for the developing countries by the Lima and Manila Declarations. In taking the above measures the special needs of the Least Developed, Land-Locked and Island Developing countries and other geographically disadvantaged countries should be borne in mind.

8. The inadequate implementation of policy measures embodied in the International Development Strategy due to the lack of political will in most developed countries, compounded with a continuing economic crisis which seriously affects the developing countries because of their greater vulnerability to external economic impulses, produced the most discouraging results. Thus the crisis of poverty, hunger, malnutrition, deprivation and illiteracy has been perpetuating in the developing world and affecting a greater number of countries and peoples.

9. The developing countries and mainly the Least Developed, Land-Locked and Island Developing countries and other geographically disadvantaged countries have been most seriously affected, inter alia, a result of shortages in food supplies and the rise in the prices of imported food. The existing deficiency of food grains of 20 million tons annually in the developing countries would increase to 100 million tons in the year 2000 if present trends of production continue as a result of insufficient investment in food production in developing countries. In view of this situation increased investment in food production in developing countries becomes imperative. Loans and other sources of financing investment in food production should therefore be provided to developing countries as grants or on concessionary terms, particularly for the least developed countries. The Conference noted with satisfaction the creation of the International Fund for Agricultural Development. It expresses the hope in the speedy and effective operation of the Fund and calls upon the developed countries to increase their contributions to the Fund. It also urges the early implementation of the other recommendations of the World Food Conference especially the establishment of an international emergency grain reserve.

10. The lack of an equitable international monetary system is of deep concern, and has aggravated the economic problems of the developing countries. Attempts at reform within the framework of existing monetary relations which is under the control of a few developed capitalist countries have ended in failure. These countries have exerted undue influence in decision making in matters relating to monetary systems and the solutions of the problems of developing countries are sought on the basis of temporary and inefficient arrangements. The Heads of State or Government of the Non-Aligned countries reaffirm that the solution of the economic problems of developing countries requires the establishment of a new, universal and equitable monetary order.

11. The efficiency and equitability of the system to be established will depend largely on the influence which the international community will be able to exert collectively on the conditions of creation and



utilization of additional liquidity, taking due account of the interests of the developing countries. It is therefore a matter of urgency that liquidity should be created which is automatically tied to the financing needs of development and that the developing countries should be guaranteed their rightful and equitable share in the monetary decision-making process.

12. The Heads of State or Government of Non-Aligned countries noted with deep concern that there is still a strong resistance from certain developed countries to the implementation of the Declaration and Programme of Action and Resolutions adopted at the Sixth and Seventh Special Sessions of the United Nations General Assembly regarding the establishment of the New International Economic Order, and the resolution adopted at the Twenty-ninth Session of the United Nations General Assembly regarding the Charter of Economic Rights and Duties of States and a continued insistence on solutions aimed at preserving the existing relations of inequality, dependence and exploitation. The resistance to the New International Economic Order by some developed countries has been even intensified.

13. The Conference notes with anxiety that no headway has been made at the Conference on International Economic Co-operation in Paris. The Heads of State or Government express their full support for the positions taken by the developing countries in the Paris Conference. They observe that the developed countries have not reacted positively to concrete proposals of the developing countries. The failure to agree upon even a work programme at the July Sessions reflects the lack of a political will on the part of the developed countries to effect substantial changes in their economic relations with developing countries. The developed countries will be held responsible for a failure of the Paris Conference which would result from their persistent refusal to accept the proposals concerning a wide range of questions of importance for the developing countries. Such a failure would prompt the developing countries to reconsider their attitudes.

14. The Heads of State or Government of the Non-Aligned countries in their assessment of the results of the UNCTAD IV noted with satisfaction the exemplary unity maintained by the developing countries throughout the negotiations. At the same time they do not fail to note that UNCTAD IV has fallen far short of the aspirations of the Non-Aligned and other developing countries as expressed in the Sixth and Seventh Special Sessions of the United Nations General Assembly and spelt out in the Manila Declaration. Of particular concern is the stand taken by some developed countries in opposing the proposals for the establishment of the Common Fund, measures for the protection of the purchasing power of the developing countries, the urgent and critical external indebtedness of the developing countries, the alleviation of specific and longstanding problems and the implementation of proposals and resolutions including the activation of the fund for the Least Developed Land-Locked and Island Developing countries. It is therefore of paramount importance that a consensus on the timetable and procedure of all forms of negotiations for the implementation of the integrated programme for commodities including the Common Fund, is acted upon. The continued support given by certain developed countries to the cause of development of the developing countries is a matter for satisfaction.

15. The Heads of State or Government of Non-Aligned countries are firmly convinced that nothing short of a complete re-structuring of international economic relations through the establishment of the New International Economic Order will place developing countries in a position to achieve an acceptable level of development. They reaffirm their determination to pursue their common efforts to achieve these objectives in particular through the formation of Producer/Exporters' Associations and other means despite threats and repressive economic sanctions.

16. The Heads of State or Government of Non-Aligned countries express the wish that the negotiations on international economic co-operation and development pursued in various international fora will be



integral parts of a mutually reinforcing and convergent process to accelerate the universal implementation of the New International Economic Order. The implementation of agreed decisions is a major responsibility of the international community.

#### IV. NON-ALIGNMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT

1. The Heads of State or Government of Non-Aligned Countries reaffirm that the struggle for political independence and the exercise of their sovereignty cannot be disassociated from the struggle for the attainment of economic emancipation. It is important that the developing countries should use their sovereignty and their independence at the political level as a lever for the attainment of their sovereignty and independence at the economic level. It is the economic issues in international negotiations that will now be the major concern of international politics. No lasting peace and security is possible internationally without the establishment of a just and fair society which provides its citizens the economic and social security which is an inalienable right of every citizen of this planet. The Heads of State or Government of Non-Aligned Countries are determined that such a society should be established in the shortest possible time thus ushering in an era of prosperity and dignity for all mankind.

2. The achievement of the full economic potential rests on the developing countries and entails the following factors:

- (a) individual self-reliance in order that developing countries may utilize their economic potential to co-operate among themselves to set up the New International Economic Order;
- (b) intensification of economic co-operation between developing countries;
- (c) strengthening of their solidarity and the coordination of the activities of the developing countries in a common front against all attempts of imperialists to sow division and to apply pressure.

3. At the Summit Conferences held in Belgrade, Cairo and Lusaka, the Heads of State or Government of Non-Aligned Countries recognized the close interaction that exists between political and economic relationships. They emphasized the need to accelerate economic development so that world peace and prosperity could be ensured for mankind. At the Georgetown meeting in 1972 the general principles of Non-Alignment were translated into concrete programmes of action to promote economic co-operation among non-aligned countries.

4. The Fourth Summit Conference in Algiers held in 1973 marked the turning point both with regard to the mutual co-operation among non-aligned and other developing countries in as much as its decisions and recommendations served as the basis for intensive international negotiations aimed at the establishment of the New International Economic Order. The Algiers Summit affirmed the solidarity of the non-aligned and other developing countries in the struggle for a better life for their peoples and placed its entire weight and influence behind the actions to be taken by producer countries of raw materials to obtain a remunerative price for their products.

5. The Declaration and the Programme of Action for the Establishment of the New International Economic Order adopted at the Sixth Special Session of the United Nations General Assembly and the Charter of Economic Rights and Duties of States adopted at the Twenty-ninth Session of the General Assembly of the United Nations on the initiative of the developing countries constitute a clear exposition of the orientation and the economic programme of Non-Alignment. The adoption of the Declaration and Programme of action for the establishment of the New International Economic Order and the Charter of Economic Rights and Duties of States also signify the rejection of the systems of exploitation, which have existed up to now. The international recognition of the principles laid down in these fundamental documents give them universal validity and constitutes a powerful contribution to the efforts for introducing equality in the international economic relations.



6. The Dakar Conference on Raw Materials First proposed at the Algiers Summit is a prominent landmark in the evolution of international economic relations and solidarity among developing countries. This Conference has embarked on a range of new initiatives which are at the very core of the establishment of the New International Economic Order. The Dakar Declaration has the most important implications for the economic development of developing countries.

7. The Lima Conference in 1975 set up new guidelines for the non-aligned countries in its Programme for Mutual Assistance and Solidarity. The programme of economic co-operation of the developing countries has been given concrete shape and form in the Manila Declaration due to the solidarity of the Non-Aligned countries and of the other developing countries within the Group of 77.

8. The Heads of State or Government of Non-Aligned Countries recognize with appreciation that the economic content of the Non-Aligned Movement have influenced and in turn has been influenced by the articulate and dynamic organization of the Group of 77. The Non-Aligned Movement shall continue to maintain and strengthen its solidarity with the Group of 77 which has today emerged as a real force of countervailing authority. The non-aligned countries emphasize the highly constructive role of the Group of 77 in the negotiations for advancing the cause of the developing countries and particularly in the establishment of the New International Economic Order.

## V. THE NEW INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER

1. The Heads of State or Government of Non-Aligned Countries are firmly of the view that nothing short of a complete re-structuring of the existing international economic relations will provide an enduring solution to the world economic problems, particularly those of the developing countries. The inadequacy and the recurring failure of the prevailing economic order have been demonstrated in the recent series of crises in the developed market economy countries including inter alia the collapse of the post-war monetary system, emergence of restrictive and protectionist

policies in world market trade, spiralling inflation, recession, mounting unemployment and steadily deteriorating levels of real income from exports of primary produce of developing countries and food crisis. These crises have also dramatized the basically dependent character of the constituent elements of the world economy and provided the necessary impetus for the world community to conceive of the New International Economic Order based on equity, sovereign equality, interdependence, common interest and co-operation among all States. Faced with this chaotic situation the world has witnessed an unprecedented solidarity among the developing countries and successful assertion of their basic, economic and political rights in the international scene.

2. The Heads of State or Government of Non-Aligned Countries view the adoption of the Declaration and the Programme of Action on the Establishment of the New International Economic Order at the Sixth Special Session of the General Assembly of the United Nations as signifying the growing determination of the international community to bring about a fundamental change in the system of international economic relations. The Establishment of the New International Economic Order calls for bold initiatives, demands new, concrete and global solutions, and is contrary to piecemeal reforms and improvisations intended to resolve the present economic difficulties. The fundamental objective of the New Economic Order is to bring about in the international economic relations an equilibrium based on justice through co-operation and human dignity.

3. The Heads of State or Government of Non-Aligned Countries once again denounce the unacceptable policies and practices of transnational corporations which, motivated by exploitative profits, exhaust the resources, distort the economies and infringe the sovereignty of developing countries; violate the principles of non-interference in the affairs of States; infringe the right of peoples to self-determination; and frequently resort to bribery, corruption and other undesirable practices and subordinate the developing countries to the industrialized countries.

4. The Non-Aligned Countries once more reaffirmed the inalienable right of all countries to exercise full permanent sovereignty over their natural and human resources and their economic activities including



possession, use and disposal of such resources and their right to nationalization. They further reaffirm the inalienable right of developing countries to exercise supervision, authority, regulation and nationalization of transnational corporations within their national jurisdiction in accordance with their laws and regulations, as well as in conformity with their national objectives and principles. They further ratify their willingness to lend rapid, efficient and unreserved support to all other developing countries in their struggle for political and economic independence, exercising effective and concrete solidarity in the face of such economic aggression as blockade, discrimination, boycott, pressure and threats or any other form of aggression that may be adopted by imperialist countries.

5. The Heads of State or Government of Non-Aligned Countries reaffirm their view that nothing short of a complete restructuring of existing international economic relations will provide an enduring solution to world economic problems. They reaffirm their determination to secure through collective action the establishment and implementation of the New International Economic Order as it has been manifested and envisaged in various resolutions. Such an order should consist, inter alia, of the following essential elements:

(a) Fundamental restructuring of the entire apparatus of international trade with a view to indexation, improving the terms of trade of developing countries and ensuring fair and remunerative prices in real terms to primary export products and an appropriate share of world trade for developing countries through the expansion of processing, diversification and full participation in transport, marketing and distribution of their products. Urgent and full implementation of the integrated programme of commodities including the measures to ensure that the interest of developing countries particularly the Least Developed and the Most Seriously Affected among them, and those lacking in natural resources, adversely affected by measures under the integrated programme are protected by means of appropriate differential and remedial measures within the programme;

(b) Basic restructuring of world production on the basis of a new international division of labour through improved access to the

markets of the developed countries for the manufactured products of developing countries, transfer of appropriate technology on favourable terms and conditions, re-development of suitable industries from developed countries to developing countries harmonization of production of synthetics and substitutes in developed countries with the supply of natural products from developing countries, the elimination of restrictive business practices and effective control of the activities of transnational corporations in conformity with the development objectives of developing countries;

- (c) Radical overhauling of the present international monetary arrangements which are characterized by the absence of a rational, equitable and universal system, chaotic currency fluctuations, haphazard growth of international liquidity, widespread inflation, lack of responsiveness to the needs of developing countries and the domination of decision making by a few developed countries. The new system should remove the dominant role of international currencies in international reserves, ensure parity in decision making as between developed and developing countries, prevent the domination of any single country over decision making and forge a link between creation of liquidity and development finance;
- (d) Ensuring adequate transfer of resources for development on an assured, continuous and predictable basis with respect to the criteria of independence and in a non-discriminatory manner not likely to create division among developing countries;
- (e) Finding urgent and adequate solutions to the problem of official debts particularly for the Least Developed and the Most Seriously Affected countries;
- (f) Providing adequate resources and appropriate technologies on favourable terms for investment to ensure increased production of food and agricultural inputs in developing countries;



- (g) The right of developing land-locked countries to free access to and from the sea in accordance with resolution No. 2 of the Fourth Conference of the Heads of State or Government of Non-Aligned Countries and the Dakar Declaration of February 1975. (Some developing countries expressed their reservation on this).

## VI. COLLECTIVE SELF-RELIANCE

1. The Heads of State or Government of the Non-Aligned Countries are of the firm belief that only a confident spirit of collective self-reliance on the part of the developing countries can guarantee the emergence of the New International Economic Order. Self-reliance implies a firm determination on the part of developing nations to secure their legitimate economic rights in international dealings through the use of their collective bargaining strength. It also involves preparedness on their part to follow internally the discipline required of them by the process of economic development with justice. And, most importantly, it means willingness to explore and pursue the immense possibilities of co-operation among themselves in financial, technical, trade, industrial and other fields.

2. The focal point of this process of growth with social justice will be eradication of unemployment and poverty. It calls for the formulation and implementation of a policy for satisfying the basic minimum needs of the population of the developing world. It is recognized that structural changes where and when necessary will be required to achieve those objectives. The Heads of State or Government of the Non-Aligned Countries are determined to use all their energies and resources to achieve this goal in the shortest possible time.

3. Recent events have generated new complementarities and opened up tremendous opportunities for co-operation among the developing world. The idea that the developing world constitutes only parallel economies is no longer valid, since the developing world reflects a wide variety of resource endowments and stages of development. The Heads of State

or Government of the Non-Aligned Countries believe that the need of the hour is to develop a common will and evolve suitable mechanisms to fully utilize the complementarities, resources and capabilities within the developing world for mutual benefit and for collective economic advancement. To this end, the Mexico Conference on Economic Co-operation among Developing Countries should examine the various alternative mechanisms and arrangements to achieve that purpose.

4. The Heads of State or Government of the Non-Aligned Countries, in reaffirming their solidarity based on the Principles of collective self-reliance recognize the necessity to give particular consideration to the special problems of the Least Developed, Land-Locked, Island Developing countries and other geographically disadvantaged countries.

5. The principle of self-reliance, thus seen in its individual and collective aspects, is not only compatible with the aims of the New International Economic Order but is a highly important factor in the strengthening of the solidarity of Non-Aligned and other developing countries in their struggle to achieve economic emancipation.

## VII. INTERDEPENDENCE WITHIN THE GLOBAL ECONOMY

1. The Heads of State or Government of Non-Aligned Countries consider that collective self-reliance within the New International Economic Order is an important and necessary step in the wider process aiming at the establishment of international co-operation which would be a concrete and genuine expression of interdependence within the global economy. International co-operation is nowadays an imperative necessity. It requires the effective participation of all in decision making and demands that those processes and relationships which lead to increasing inequality and greater imbalance are put to an end. In their strategy of international economic co-operation, concurrently with the intensification of the relations between themselves, it is desirable that the non-aligned countries diversify their economic relations with the other countries, developed capitalist as well as socialist, on the basis of the principles of respect for national sovereignty, of equality and of mutual benefit.



2. The Heads of State or Government of Non-Aligned Countries recognize that the responsibility for ushering in a new era of just and equitable relationship belongs to all but specially to the developed countries. However, such responsibility lies more heavily on those who wield economic power. Moreover, the establishment of the New International Economic Order requires determined and effective action on the part of the developed countries in all the major areas of international economic relations. The developed world as a whole can no longer shy away from its share of responsibility under any pretext, nor can it afford to ignore the fundamentally indivisible nature of the global prosperity.

3. The Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, therefore, call upon the developed world to give convincing expression to their faith in the principle of Global Interdependence by adopting a range of measures which alone will lead to true international co-operation and emergence of the New Economic Order.

## VIII. CONCLUSION

1. The Heads of State or Government note that previous Summits have in the economic field been marked by numerous innovative forward steps. The Belgrade Summit paved the way for the establishment of UNCTAD. The Cairo Summit called upon the international community to restructure the world economy in a manner conducive to the urgent economic development of developing countries. At the Lusaka Summit, non-aligned countries pledged themselves to actively cultivate the spirit of self-reliance; the initiatives stemming from the Algiers Summit launched non-aligned countries on a path of asserting that spirit of self-reliance through their collective bargaining strength, based upon the right of permanent sovereignty over natural resources and economic activities, the development of producers' associations and the proclamation in the United Nations of the New International Economic Order.

2. The Colombo Summit in the view of Heads of State or Government heralds a new phase in which the growing economic potential of non-aligned and other developing countries, creates a momentum for the establishment of the New International Economic Order with a particular emphasis upon the new international monetary and financial system that is an essential element of that order. In the words of the Chairman of the Conference, Hon. Mrs. Sirimavo Bandaranaike, 'If we really and truly want to blunt the weapons of imperialism and colonialism we must surely fashion countervailing weapons in the areas of international money and finance'.

3. The Heads of State or Government declare their commitment to work towards the restructuring of existing systems while inviting the co-operation of the entire international community in the endeavour to develop a democratic equitable and universal monetary and financial system and to establish the New International Economic Order.